

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abas, M., dkk. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Alhusain, Achmad Sani, dkk. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Arifin, Firdaus, and Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asmara, Galang, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, 16th ed. United States: Pearson Education, 2016.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Igirisa, Irawaty. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Isretno, Evita. *Hukum Administrasi negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Kartika, Rita, Atik Krustiyati, and Ibnu Sam Widodo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Damera Press, 2024.

- Maulana, Delly, and Arif Nugroho. *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Serang: CV. AA. Rizky, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007.
- Raden, Sahran. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Bravo Press, 2024.
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Fardiansyah, Hardi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2020.
- Sadi, Muhammad, and Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Suprayitno, Degdo, dkk. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktek)*. Depok: PT raja Grafindo Persada, 2018.
- Syarifudin, Akhmad. *Perpajakan: Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS, 2016.

Jurnal

Abdi, Surya Annisa, and Imam Agus Faisol. Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan.” *Neo-Bis*, Vol. 12(1) (2023): 91-108.

Adiyanta, F. C. Susila. “Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional).” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1(2) (2018): 165-181.

Adnan, Zulkifli, dkk. “Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Insentif: Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Garut”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 16 (2) (2025): 59-67.

Andriyansyah, Arief Prayitno, and Nursahidin. “Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang Wilayah Cirebon 1 Sumber.” *Action Research Literate*, Vol. 9 (2) (2025): 449-462.

Anggraini, Relita Winda. “Tax Compliance Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari *Theory of Planned Behavioral*: Konseptual Model,” *Proceeding of Natinal Conference on Accounting & Finance*, Vol. 3, (2021): 92-98.

Asmawati, Astu, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap efektivitas Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13 (3) (2024): 11-20.

- Bate,e, Maria Magdalena. "Analisis Sistem Pelaksanaan Penghitungan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kantor Samsat Gunung Sitoli." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Vol. 4 (2) (2018): 1163-1184.
- Bintary, Abharina Avidaniar. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018." *Jurnal Pajak Vokasi*, Vol. 1(2) (2020): 86-101.
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafira. "Harmonisasi Ragulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 (3) (2023): 699-711.
- Fajar, Ghiska, and Wicipto Setiadi. "Demokrasi, etika Bernegara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: Telaah Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia." *Hukum Responsif*, Vol. 15 (2) (2024):308-318.
- Firmansyah, Hamzah, and Hadian Nurdiana. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Padamukti Tahun 2018-2020." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Vol. 11 (3) (2022): 576-588.
- Gustaviana, Sandy. "Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 1 (1) (2020): 20-29.
- H. Edward. "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol. 42 (1) (2016): 1-10.
- Ichlas, Fachrel, Lili Indrawati, and Yanti Rufaedah. "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di

- Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020.” *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 3 (1) (2022): 93-99.
- Junaidi, Jujun, Irwan Gani, and Akhmad Noor. “Analisis Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.” *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 17 (2) (2020): 264-269.
- Kowel, Viva A.A., Lintjen Kalangi, and Steven J. Tangkuman. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 7 (3) (2019): 4251-4260.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI (2) (2021): 324-334.
- Misra, Fauzan. “Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models,” *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, Vol. 3 (2) (2019): 189-204.
- Rahayu, Niken, Siska Yulia Defitri, and Rita Dwi Putri. “Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan dan Sosialisasi Pajak.” *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, Vol. 10 (2) (2024): 541-550.
- Ramli. “Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 (1) (2020): 41-47.
- Refki, Muhammad, Helmi, and Syamsir. “Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum”, *Hangoluan Law Review*, Vol. 3 (1) (2024): 345-369.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9(4) (2015): 577-602.

- Santika, Dhesta Adellya, dkk. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah." *Adijaya Jurnal Multidisiplin*, Vol. 3 (2) (2025): 249-260.
- Septraliani, Lia, and Ismet Ismatullah. "Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 (1) (2021): 16-25.
- Setyoko, Joko, Ronal Dison, and Aris Romadin. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 6(1) (2024): 56-72.
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7(1) (2015): 57-67.
- Sulaiman, and Muhammad Nasir. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi." *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7 (1) (2023): 94-103.
- Sumeleh, Elisa J. "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum*, Vol. 5 (9) (2017): 130-137.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30 (2) (2020): 129-153.
- Yusran, and Dwi Cahya Ambarwati. , "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Negara." *Jurisdictie*, Vol. 7 (2) (2025): 79-94.
- Zakir, Fauzan. "Relevansi Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif." *Journal Of Global Legal Review*, Vol. 3 (2) (2025): 95-106.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Website atau Internet

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Subbagian Hubungan Masyarakat, “Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng Berakhir, Sumbang PAD Rp300 Miliar Lebih.” *Mediaindonesia.com*, https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/07/20250703-O-JT1-Provinsi-Jawa-Tengah-mediaindonesia-Pemutihan-Pajak-Kendaraan-Jate_.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2026.

Haq, Arina Zulfa Ul. “Pemprov Jateng Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Catat Batas Waktunya!”, *Detik Jateng*, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7838842/pemprov-jateng-hapus-tunggakan-pajak-kendaraan-catat-batas-waktunya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Kainaz. “Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Tengah 2025: Bebas Tunggakan dan Denda, Simak Jadwal dan Syaratnya”, *Kabar Jawa*, <https://kabarjawa.com/berita/pemutihan-pajak-kendaraan-jawa-tengah-2025-bebas-tunggakan-dan-denda-simak-jadwal-dan-syaratnya>, diakses pada tanggal 28 November 2025.

Shodik, Ajis. “Kemendagri Tekankan Pentingnya PKB dan BBNKB sebagai Sumber Strategis PAD”. *Pelita.co*, <https://www.pelita.co/news/kemendagri-tekankan-pentingnya-pkb-dan-bbnkb-sebagai-sumber-strategis-pad/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2026.

<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-atribusi-delegasi-dan-mandate-dalam-hukum-administrasi/>

Wawancara

Hingar Adi Wibowo, S.Hum., Staff Administrasi Bidang Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, (13 April 2026), di Ruang Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lain-lain

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025, Vol 50*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Laporan Perkembangan Ekonomi&Fiskal Daerah: Reformasi Birokrasi & Penguatan SDM di Daerah*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2024, Vol. 10*, (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2019.